

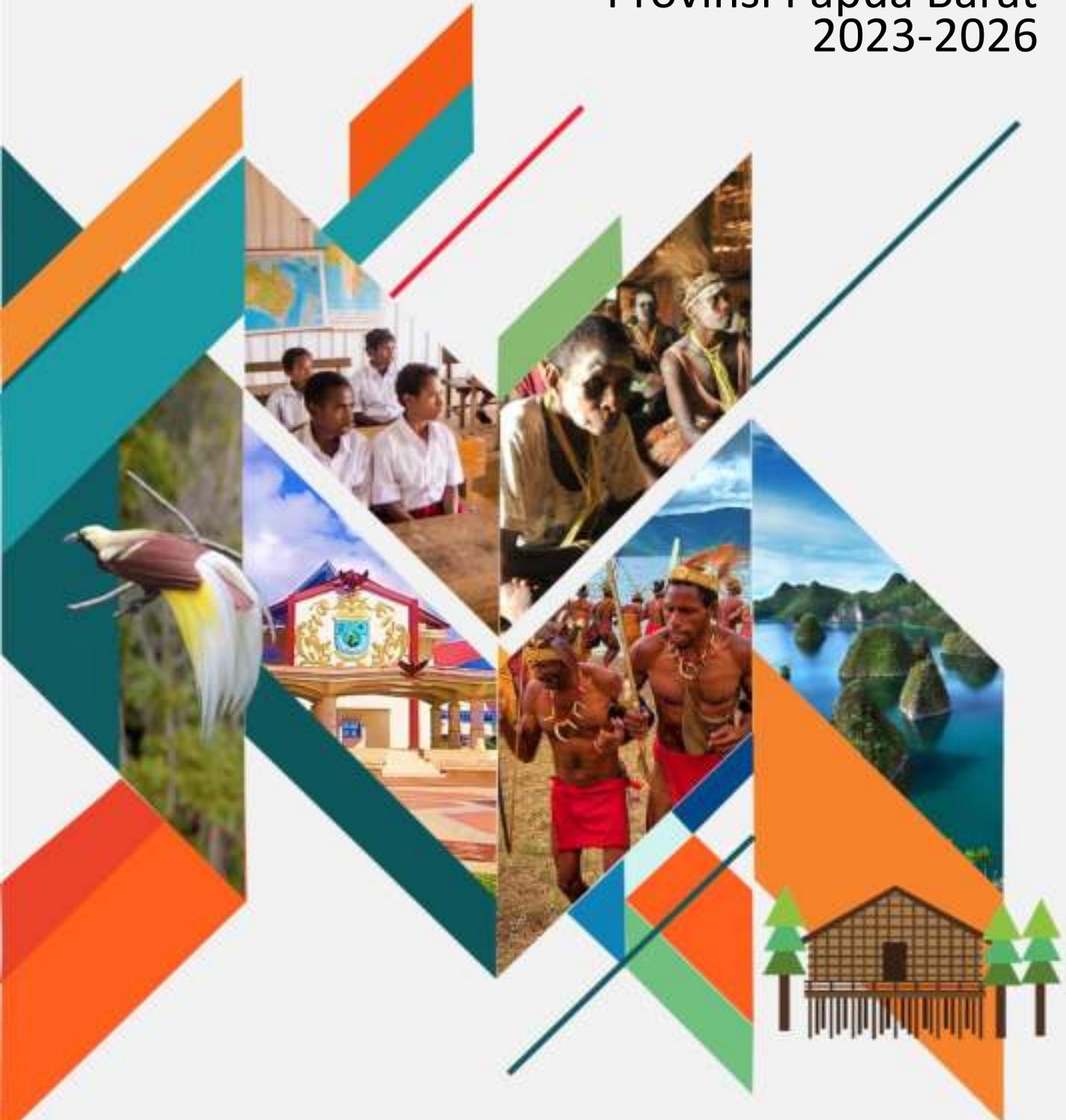


PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT
2023

RENSTRA

Dinas Kesehatan

Provinsi Papua Barat
2023-2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2023 – 2026 telah dapat disusun dengan baik. Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 – 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2023 – 2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Tahun 2023 – 2026 serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Di dalamnya memuat pula sasaran kegiatan/sub kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam semua penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih. Semoga Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 2023 – 2026 sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Manokwari, Oktober 2023

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA BARAT



Dr. FEANY MAYANA PAISEY, M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19720501 200212 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

| | | |
|-----|------------------------|-----|
| 1.1 | LATAR BELAKLANG | I-1 |
| 1.2 | Analisa LANDASAN HUKUM | I-2 |
| 1.3 | MAKSUD DAN TUJUAN | I-5 |
| 1.4 | SISTEMATIKA PENULISAN | I-6 |

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

| | | |
|-----|---|-------|
| 2.1 | TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORAGANISASI | II-1 |
| 2.2 | SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH | II-9 |
| 2.3 | KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | II-13 |
| 2.4 | TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | II-22 |

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

| | | |
|-----|---|--------|
| 3.1 | IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYTANAN PERANGKAT DAERAH | III-1 |
| 3.2 | TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIA KESEHATAN | III-4 |
| 3.3 | TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) | III-10 |
| 3.4 | PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS | III-11 |

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

| | | |
|-----|---|------|
| 4.1 | TUJUAN JANGKAH MENENGAH OPD DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT | IV-1 |
| 4.2 | SASARAN JANGKAH MENENGAH OPD DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT | IV-2 |

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

| | | |
|--|-----------------------------|-----|
| | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | V-1 |
|--|-----------------------------|-----|

BAB VI RENCANA PROGREAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

| | | |
|-----|---|------|
| 6.1 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN | VI-1 |
| 6.2 | INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF | VI-7 |

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

| | | |
|--|---------------------------------------|-------|
| | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | VII-1 |
|--|---------------------------------------|-------|

BAB VIII PENUTUP

| | | |
|--|---------|--------|
| | PENUTUP | VIII-1 |
|--|---------|--------|

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

A DAFTAR TABEL

| | | |
|-----|---|-------|
| 2.1 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat | II-15 |
| 2.2 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat | II-21 |
| 3.1 | Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | III-1 |
| 3.2 | Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan | III-5 |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat | IV-3 |
| 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat | V-2 |
| 6.1 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator dan Pendanaan | VI-8 |
| 7.1 | Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | VII-1 |
| 7.2 | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD | VII-2 |

B DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----|---|-------|
| 2 | Struktur Organisasi | II-2 |
| 2.1 | Persentase ASN menurut Golongan | II-9 |
| 2.2 | Jumlah ASN menurut Eselon | II-10 |
| 2.3 | Persentase ASN menurut Jenjang Pendidikan | II-10 |
| 2.4 | Persentase ASN menurut Jenis Kelamin | II-11 |
| 2.5 | Persentase PPPK menurut Jenjang Pendidikan | II-11 |
| 2.6 | Persentase PPPK menurut Jenjang Jenis Kelamin | II-12 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan dalam struktur organisasi yang ada. Pemikiran yang mendasari konsep perencanaan strategis adalah menghubungkan isu-isu strategis yang ada dengan tujuan yang ingin dicapai dengan dukungan serta konstrain sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, keuangan dan peralatan serta fasilitas terkait. Perencanaan strategis sedapat mungkin juga perlu melibatkan para pemangku kepentingan yang luas untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai dalam waktu yang ditentukan; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Secara legal formal, penyusunan dan penetapan RENSTRA-Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026 merupakan bagian terintegrasi dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 yang menyebutkan bahwa Gubernur yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026 serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah (PD)

untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Sedangkan untuk sistematika penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai salah satu perangkat daerah, **Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat** berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam horizon waktu tahun 2023-2026. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi Papua Barat untuk periode tahun 2023-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- 
- beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Provinsi Papua;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan Pengelolaan Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2006 - 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Kesehatan Papua Barat adalah merancang perencanaan strategis pembangunan di bidang urusan wajib pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar selama periode tahun 2023 2026, yang selanjutnya berfungsi untuk :

1. Menjadi dasar acuan bagi penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di bidang kesehatan
2. Pedoman strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan daerah di bidang urusan wajib pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan amanat Tugas Pokok dan Fungsi yang ditetapkan
3. Penjabaran dan uraian teknis dokumen perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026 di tingkat urusan kewenangan dan organisasi perangkat daerah

Sedangkan **Tujuan** Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah ini adalah Merancang komponen-komponen perencanaan strategis Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026, yaitu :

1. Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang mengemuka di bidang kesehatan ;
2. Merumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah di bidang urusan wajib pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Merancang strategi dan arah kebijakan pembangunan di bidang urusan wajib pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
4. Merumuskan Program, Kegiatan, subkegiatan dan plafon anggaran pembangunan daerah yang responsif terhadap permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah di bidang urusan wajib pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
5. Menetapkan target kinerja pembangunan daerah di bidang urusan wajib pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar selama periode tahun 2023-2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat disusun melalui sistematika sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat**, Bab ini memuat informasi tentang peran, tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas mengenai sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis** mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Dinas Kesehatan Papua Barat, serta penentuan isu-isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran**, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan**, berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, mengemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang akan dicapai dalam



lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.

BAB VIII. Penutup, berisi ringkasan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian, dan 15 (lima belas) Seksi.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang Kesehatan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepala Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis;
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas kesehatan Provinsi Papua Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat.



Struktur Dinas Kesehatan Papua Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, Terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program Informasi Dan Humas;
 - 2) Subbagian Keuangan & Pengelolaan Aset
 - 3) Subbagian Hukum, Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Keluarga & Gizi
 - 2) Seksi Promosi & Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Seksi Kes Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- d. Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit (P2P), terdiri dari :
 - 1) Seksi Surveilans & Imunisasi
 - 2) Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
 - 3) Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Kesehatan Jiwa
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi pelayanan Kesehatan Tradisional.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kefarmasian
 - 2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Alat Rumah Tangga
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2.1.3 Uraian Tugas

Pembentukan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Uraian Tugas Dan

Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat, terdiri dari :

a. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis;
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumah tanggaan dan kepegawaian, dimana Sekretariat Dinas Kesehatan Papua Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja sekretariat;
- 2) Pengkoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas Kesehatan;
- 3) Pengkoordinasian penyusunan dan penyajian data statistic lingkup Dinas Kesehatan;
- 4) Pengelolaan Administrasi Dinas Kesehatan;
- 5) Pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Dinas Kesehatan;
- 6) Pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas Kesehatan;
- 7) Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas Kesehatan;

- 8) Pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas Kesehatan;
- 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan;
- 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas dan fungsi :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perkoordinasian, monitoring evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Kesehatan masyarakat tingkat daerah provinsi, dimana Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana Bidang;
- 2) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesehatan masyarakat;
- 3) Penyampaian bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Kesehatan masyarakat;
- 4) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - 5) Penyiapan pelaksanaan kebijaksanaan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan olahraga;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan olahraga;

- 7) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kesehatan dan promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan olahraga;
 - 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang, dan
 - 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mempunyai tugas dan fungsi :
- Tugas dari Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pencegahan pengendalian penyakit tingkat daerah provinsi, dimana Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 1) Menyusun rencana kerja bidang;
 - 2) Penyiapan bahan pelaksanaan dan rumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - 4) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang survveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa;
 - 5) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa;

- 7) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang survveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas Bidang Pelayanan Kesehatan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pelayanan Kesehatan tingkat daerah provinsi, dimana Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang;
- 2) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelayanan Kesehatan;
- 4) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional;
 - 5) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi di bidang pelayanan Kesehatan primer, rujukan, dan tradisional;
 - 7) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan Kesehatan primer, rujukan dan tradisional;
 - 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan

- 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, mempunyai tugas dan fungsi :
- Tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan sumber daya kesehatan tingkat daerah provinsi, dimana Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
- 1) Penyusunan rencana kerja bidang;
 - 2) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sumber daya kesehatan;
 - 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan sumber daya kesehatan;
 - 4) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan dan sumber daya manusia Kesehatan;
 - 5) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan dan sumber daya manusia Kesehatan;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan dan sumber daya manusia Kesehatan;
 - 7) Pelaksanaan bimbingan teknis dan surpevisi di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan dan sumber daya manusia Kesehatan;
 - 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
 - 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat telah dibentuk UPTD-IFP yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD-IFP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPTD-IFP menyelenggarakan fungsi :

- 1) perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemantauan dan evaluasi Sediaan Farmasi , BMHP dan perbekalan kesehatan yang diperlukan oleh pelayanan kesehatan;
- 2) pengelolaan dan pendistribusian Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan;
- 3) penyusunan analisis kebutuhan, pencatatan dan pelaporan persediaan dan Mutasi Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan;
- 4) pengamatan mutu/kualitas Persediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
- 5) monitoring dan evaluasi penggunaan Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan serta melakukan pembinaan pada unit pelayanan kesehatan;
- 6) penyusunan standar dan prosedur pengelolaan Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD-IFP dibantu oleh :

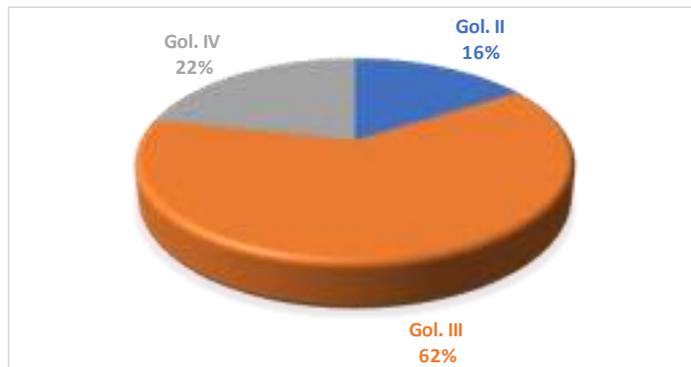
- 1) Subbagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Analisis, Penerimaan, Distribusi dan Pengamanan;
- 3) Seksi Penyimpanan, Pemeliharaan dan Penyiapan; dan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

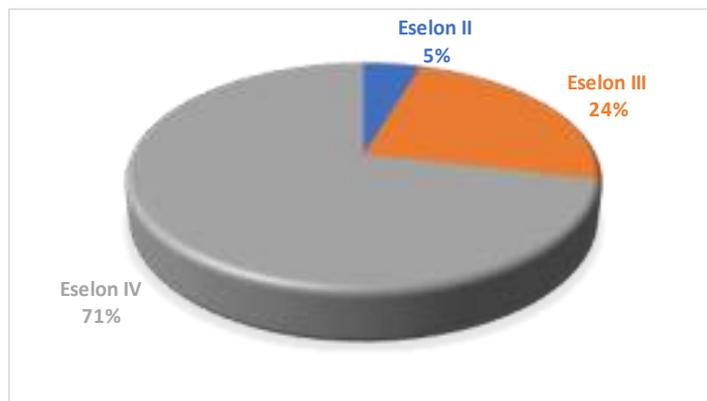
Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 80 orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja sebanyak 8 orang. Berikut adalah jumlah SDM menurut Golongan, Eselon, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Kelamin :

- a. Jumlah ASN Dinas Kesehatan menurut Golongan : Golongan-IV berjumlah 19 orang, Golongan-III berjumlah 55 orang, dan Golongan-II berjumlah 14 orang.



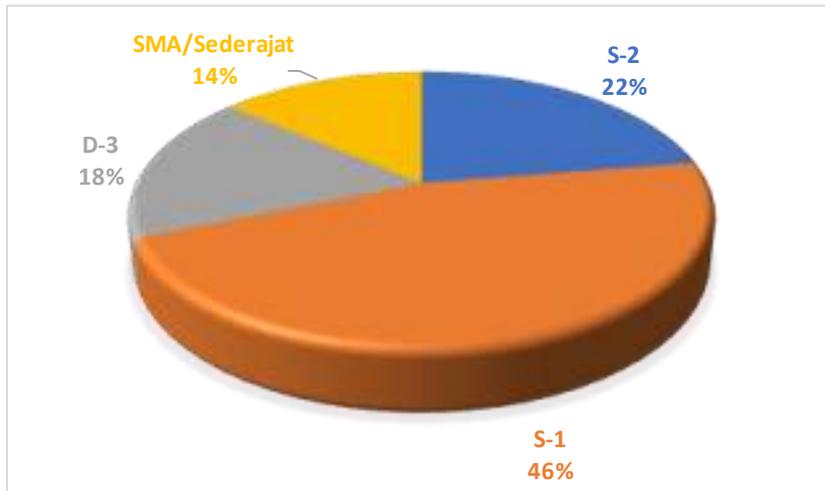
Gambar 2.1 Persentase ASN menurut Golongan

- b. Jumlah ASN Dinas Kesehatan menurut Eselon : Eselon-II berjumlah 1 orang, Eselon-III berjumlah 5 orang, dan Eselon-IV berjumlah 15 orang.



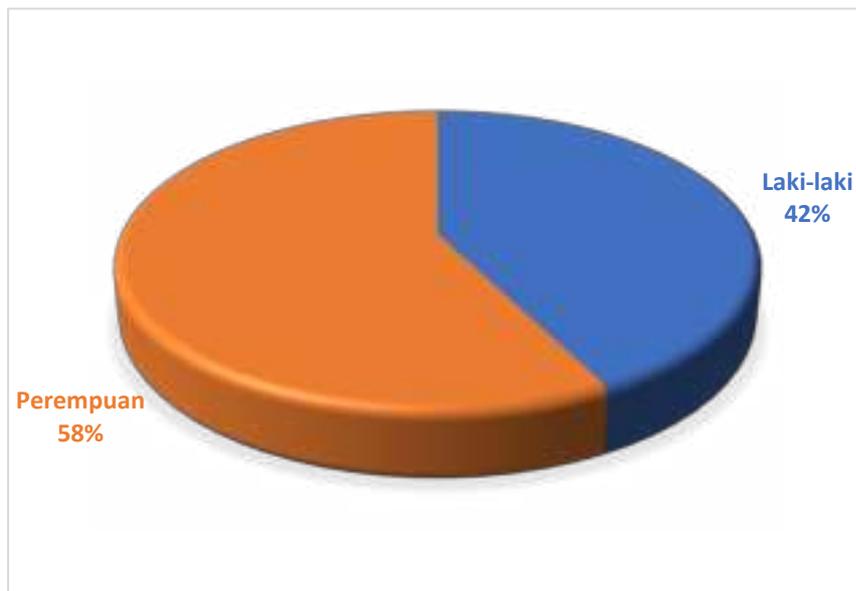
Gambar 2.2 Jumlah ASN menurut Eselon

- c. Jumlah ASN Dinas Kesehatan menurut jenjang Pendidikan : Strata-II (S2) berjumlah 18 Orang, Strata-I (S1) berjumlah 37 orang, Diploma-III (D3) berjumlah 14 orang, dan SMA/Sederajat berjumlah 11 orang.



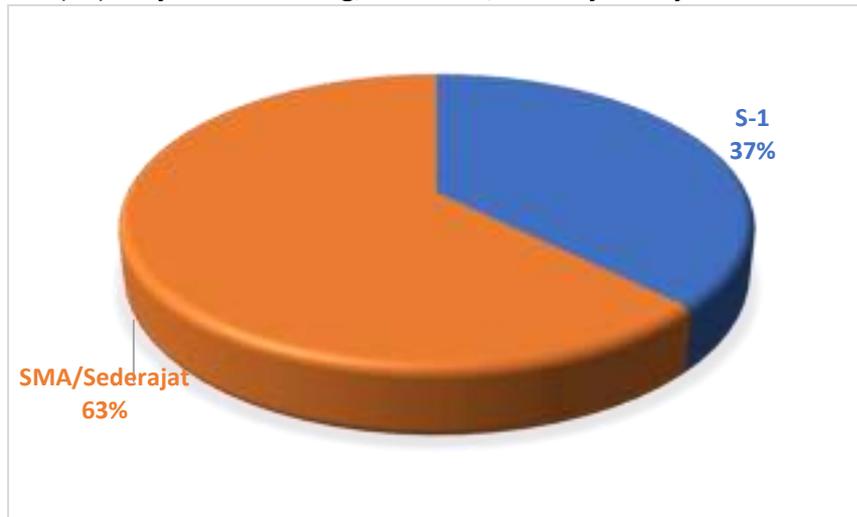
Gambar 2.3 Persentase ASN menurut Jenjang Pendidikan

- d. Jumlah ASN Dinas Kesehatan menurut Jenis Kelamin : Laki-laki berjumlah 34 orang, perempuan berjumlah 46 orang.



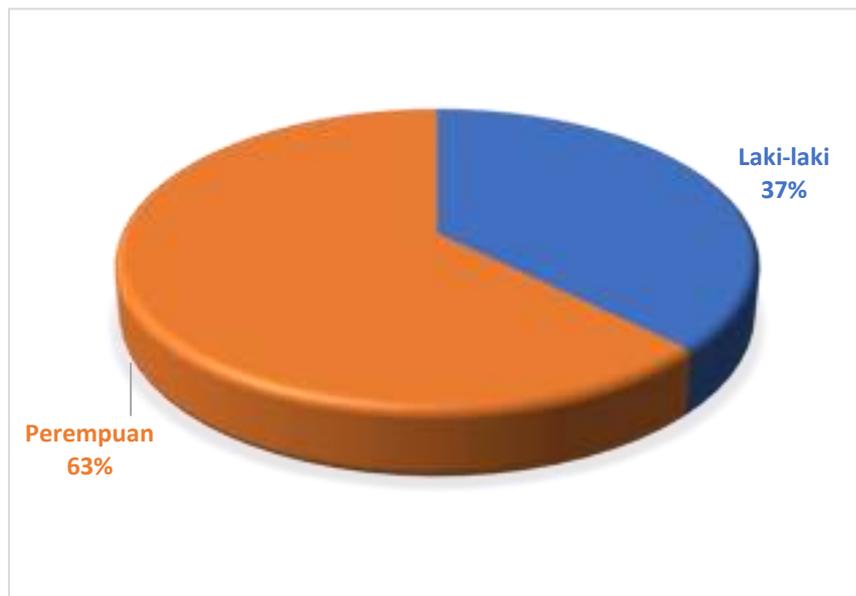
Gambar 2.4 Persentase ASN menurut Jenis Kelamin

- e. Jumlah PPPK Dinas Kesehatan menurut Jenjang Pendidikan : Strata-I (S1) berjumlah 3 orang, dan SMA/Sederajat berjumlah 5 orang.



Gambar 2.5 Persentase PPPK menurut Jenjang Pendidikan

- f. Jumlah PPPK Dinas Kesehatan menurut Jenis Kelamin : Laki-laki berjumlah 3 orang, dan Perempuan berjumlah 5 orang.



Gambar 2.6 Persentase PPPK menurut Jenis Kelamin

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Kesehatan Papua Barat memiliki sarana/ Prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Operasional Dinas Kesehatan, sarana dan prasaran tersebut berupa Gedung, Gudang, Mobil (Mobil Operasional Ambulance). Kegiatan Operasional Dinas kesehatan Papua Barat dilaksanakan di :

- 1) Kantor Utama/ Gedung Induk terletak di Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat, Jalan Brigjen (Purn) Abraham O. Ataruri, Arfai, Manokwari.
- 2) UPTD - IFP terletak di Jalan Brigjen Abraham O. Ataruri, Arfai, Manokwari.
- 3) RSUD Provinsi Papua Barat terletak di Kompleks Irman Jaya, Jalan Angkasa Mulyono, Amban, manokwari.

Sarana Penunjang Kegiatan Pelayanan yang dimiliki Oleh Dinas Kesehatan Papua Barat antara lain :

- 1) 5 Buah Ambulance;
- 2) 15 Unit Mobil Dinas/ Operasional
- 3) 25 Unit Motor/ Kendaraan Operasional
- 4) 77 Unit Laptop
- 5) 31 Unit Personal Computer/ PC

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Indikator pelayanan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2017-2021 dimana pencapaian Indikator-indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

**Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi Papua Barat**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Tahun ke- (%) | | | | |
|-------|--|-------------|------------|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2.1.2 | Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Kab/Kota yang Memiliki Profil Kesehatan Setiap Tahunnya | | | | 15,38 | 30,76 | 46,15 | 61,53 | 76,92 | 15,38 | 84,62 | 84,62 | 84,62 | 84,62 | 100 | 36,35 | 183,36 | 72,71 | 90,90 |
| 2 | Angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran | 16,00 | | | 45,00 | 43,00 | 42,00 | 42,00 | 41,00 | 8,24 | 7,10 | 9,89 | 8,00 | 5,42 | 181,70 | 183,49 | 176,46 | 180,94 | 186,77 |
| 3 | Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup | 10,00 | | | 955,00 | 957,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 991,76 | 992,90 | 990,11 | 992,00 | 994,58 | 96,15 | 96,25 | 96,65 | 96,45 | 96,26 |
| 4 | Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup | 183,00 | | | 190,00 | 180,00 | 170,00 | 160,00 | 150,00 | 207,06 | 202,82 | 187,64 | 192,22 | 30,07 | 100,00 | 15,38 | 23,08 | 23,08 | 30,77 |
| 5 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak di Usia Pendidikan Dasar Kabupaten/kota | | | | 15,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 15,38 | 15,38 | 23,08 | 23,08 | 30,77 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak di Usia Pendidikan Dasar Kabupaten/kota | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 23,08 | 650,20 | 650,20 | 15,38 | 433,28 | 433,28 |
| 8 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Produktif di Kabupaten/kota | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 23,08 | 650,20 | 650,20 | 15,38 | 433,28 | 433,28 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia LanjutKabupaten/kota | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 23,08 | 30,77 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 23,08 | 324,99 |
| 10 | Persentase Kab/kota yang melaksanakan Keluarga Sehat | | | | 10,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 7,69 | 15,38 | 15,38 | 23,08 | 61,54 | 76,90 | 61,52 | 51,27 | 65,94 | 65,00 |
| 11 | Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat | | | | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 36,36 |
| 12 | Persentase Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Hidup Sehat | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 15,38 | 15,38 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 15,38 | 15,38 | 38,46 | 38,46 | 38,46 |
| 13 | Persentase Kemitraan Kesehatan Terhadap Lembaga Agama, Adat dan Lembaga Kemasyarakatan | | | | 10,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
| 14 | Persentase Pasien Masyarakat Miskin Sakit Berat di Rujuk | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 76,92 | 38,46 | 61,53 | 100,00 | 100,00 | 76,92 | 38,46 | 61,53 |
| 15 | Persentase Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) | | | | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 97,30 | 97,07 | 96,27 | 85,45 | 84,11 | 71,94 | 72,11 | 83,10 | 94,95 | 84,11 |
| 16 | Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 25% fasilitas pelayanan kesehatan dasarnya dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar berkualitas | | | | 25,00 | 31,00 | 46,00 | 62,00 | 77,00 | 15,38 | 84,62 | 84,62 | 84,62 | 84,62 | 61,52 | 36,63, | 54,36 | 73,27 | 91,00 |
| 17 | Persentase Pelayanan Kesehatan Yang dilaksanakan dilingkungan kantor Gubernur Papua Barat | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 18 | Cakupan Kab/Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja | | | | 15,38 | 31,00 | 46,00 | 62,00 | 77,00 | 12,90 | 14,47 | 74,21 | 73,29 | 72,84 | 83,88 | 46,68 | 61,99 | 84,60 | 94,60 |
| 19 | Angka kematian calon jemaah haji <2 per 1.000 calon jemaah haji pada setiap tahun penyelenggaraan haji sampai tahun 1443H / 2022M | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 20 | Cakupan Puskesmas Terakreditasi di Distrik | | | | 10,00 | 29,00 | 49,00 | 68,00 | 87,00 | 23,87 | 32,08 | 44,03 | 43,48 | 43,21 | 41,89 | 90,40 | 89,86 | 156,39 | 201,34 |
| 21 | Jumlah Rumah Sakit Rujukan | | | | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 200,00 | 200,00 |
| 22 | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 116,20 | 105,73 | 90,83 | 93,45 | 93,85 |
| 23 | Persentase ketersediaan obat dan vaksin | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 83,21 | 85,21 | 90,51 | 90,51 | 80,00 | 83,21 | 85,21 | 90,51 | 95,21 |
| 24 | Jumlah Tanaman Obat Asli Papua Yang terdata | | | | 10,00 | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 4540,00 | 2270,00 | 1135,00 | 756,67 | 567,50 |
| 25 | Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar | | | | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 23,87 | 32,87 | 44,03, | 43,48 | 43,21 | 39,78 | 45,83 | 55,04 | 48,31 | 43,21 |
| 26 | Cakupan Sarana dan Prasarana UTD dan BDRS Tingkat Provinsi | | | | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 53,85 | 53,85 | 61,54 | 61,54 | 61,54 | 89,75 | 76,93 | 76,93 | 68,38 | 61,54 |
| 27 | Rasio Tenaga Kesehatan, Dokter, Tenaga Medis persatuan penduduk | | | | TK:0,76; D:0,38; TM:0,38 | TK:1,05; D:0,52; TM:0,53 | TK:1,32; D:0,65; TM:0,67 | TK:1,57; D:0,77; TM:0,80 | TK:1,81; D:0,89; TM:0,92 | TK:4,95; D:0,89; TM:0,65 | TK:4,45; D:0,35; TM:0,56 | TK:3,43; D:0,27; TM:0,41 | TK:5,59; D:0,27; TM:0,92 | TK6,02; D:0,51; TM:0,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 28 | Jumlah Tenaga Kesehatan dan Bidan Desa Yang ditempatkan | | | | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,03 | 23,77 | 0,00 |
| 29 | Jumlah Tenaga Kesehatan dan Bidan Desa Yang ditempatkan | | | | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,03 | 23,77 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 30 | Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi | | | | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 88,29 | 79,14 | 91,40 | 71,92 | 73,05 | 67,96 | 88,45 | 114,25 | 125,14 | 136,89 |
| 31 | Menurunnya prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 menjadi <1,5% pada tahun 2022 | | | | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 2,25 | 1,93 | 1,79 | 1,95 | 2,00 | 88,89 | 98,45 | 99,44 | 87,18 | 80,00 |
| 32 | Pencapaian UCI desa | | | | 50,00 | 60,74 | 73,83 | 82,73 | 91,43 | 77,72 | 80,43 | 75,31 | 75,31 | 75,31 | 64,33 | 80,49 | 102,00 | 109,85 | 121,40 |
| 33 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Malaria | | | | 48,39 | 65,04 | 88,78 | 90,50 | 95,49 | 91,78 | 93,31 | 97,57 | 98,53 | 99,03 | 52,72 | 69,70 | 109,90 | 91,85 | 96,43 |
| 34 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,77 | 98,68 | 99,15 | 100,00 | 100,00 | 101,25 | 101,34 | 99,15 | 100,00 | 100,00 |
| 35 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA | | | | 74,31 | 87,94 | 90,51 | 92,96 | 95,41 | 69,42 | 36,01 | 41,46 | 72,00 | 69,60 | 93,42 | 40,95 | 45,81 | 77,45 | 72,95 |
| 36 | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten/kota | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,99 | 100,00 | 100,11 | 100,11 | 99,89 | 100,01 | 100,00 |
| 38 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM di Kabupaten/kota | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,99 | 100,00 | 100,11 | 100,11 | 99,89 | 100,01 | 100,00 |
| 39 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten/kota | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 34,00 | 500,00 | 400,00 | 30,00 | 333,33 | 294,12 |
| 40 | Jumlah kabupaten dengan eliminasi kusta | | | | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 36,36 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41 | Persentase Jumlah Orang Yang Minum Obat Filariasis | | | | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 97,00 | 73,30 | 85,21 | 89,25 | 76,80 | 71,67 | 91,63 | 99,75 | 99,17 | 80,84 | 73,89 |
| 42 | Persentase Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Pandu PTM | | | | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 97,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 60,00 | 63,00 | 68,75 | 64,71 | 66,67 | 63,16 | 64,95 |
| 43 | Cakupan Pelayanan Kesehatan ISPA Kabupaten/kota | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,89 | 99,89 | 99,99 | 99,99 | 100,00 | 100,11 | 99,89 | 99,89 | 99,99 | 100,00 |
| 44 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Frambusia | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45 | Cakupan Penanggulangan Diare | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 18,33 | 59,99 | 82,11 | 80,94 | 77,23 | 18,33 | 59,99 | 82,11 | 80,94 | 77,23 |
| 46 | Kabupaten/kota dengan minimal i fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan dan mengembangkan yankes indera sesuai standar | | | | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 66,67 | 60,00 | 37,50 | 27,27 |
| 2.1.2.4.7 | Cakupan Korbinwas Kinerja Pengelolaan Dana Otsus Bidang Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Angka Kematian ibu OAP | | | | 37,00 | 34,00 | 30,00 | 28,00 | 25,00 | 37,00 | 34,00 | 31,00 | 32,00 | 39,00 | 100,00 | 100,00 | 96,67 | 85,71 | 44,00 |
| 2. | Bumil, OAP Dapat Asupan Makanan Tambahan | | | | 69,00 | 79,35 | 91,25 | 100,00 | 100,00 | 85,84 | 69,44 | 99,85 | 73,60 | 99,85 | 80,38 | 114,27 | 109,41 | 135,87 | 100,15 |
| 3. | Balita OAP dapat Asupan makan Tambahan | | | | 69,00 | 79,35 | 91,25 | 100,00 | 100,00 | 81,99 | 90,94 | 99,81 | 96,40 | 96,40 | 84,16 | 87,26 | 109,38 | 103,73 | 103,73 |
| 4. | Cakupan Penempatan Apoteker OAP di Fasilitas Kesehatan | | | | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 16,67 | 16,67 | 00,00 | 00,00 | 20,41 | 449,91 | 479,90 |
| 5. | Angka Kematian Bayi OAP | | | | 26,00 | 24,00 | 22,00 | 20,00 | 18,00 | 8,00 | 7,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 169,23 | 170,83 | 154,55 | 160,00 | 172,22 |
| 6. | Jumlah Kasus Baru HIV Positif | | | | 90,00 | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 409,00 | 380,00 | 697,00 | 405,00 | 364,00 | 0,22 | 0,21 | 0,10 | 0,15 | 0,14 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 7. | Penempatan Apoteker OAP di Fasilitas Kesehatan | | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 16,67 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 899,82 | 899,82 |
| 8. | Jumlah RSUD Kelas C yang Terakreditasi | | | | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 169,23 | 125,00 | 71,43 | 62,50 | 55,56 |
| 9. | RSUD Rujukan provinsi | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 33,33 |
| 10. | Dokter Spesialis dari OAP | | | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 12,00 | 83,33 | 120,00 | 120,00 |
| 11. | Dokter Spesialis dari OAP | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 76,92 | 38,46 | 61,53 | 100,00 | 100,00 | 76,92 | 38,46 | 61,53 |
| 1.2.2 | Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Angka harapan hidup | | | | 65,40 | 65,50 | 65,60 | 65,80 | 65,80 | 62,32 | 65,55 | 65,90 | 66,02 | 66,14 | 99,88 | 100,08 | 100,46 | 100,49 | 100,52 |
| 2. | Persentase balita gizi buruk | | | | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 5,10 | 4,10 | 2,80 | 2,80 | 4,07 | 88,24 | 97,56 | 80,00 | 107,14 | 61,49 |
| 3. | Persentase balita gizi kurang | | | | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 14,80 | 12,10 | 7,40 | 7,40 | 9,38 | 60,81 | 66,12 | 105,71 | 81,08 | 53,32 |
| 4. | Cakupan kampung siaga aktif | | | | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 9,25 | 17,25 | 24,24 | 31,55 | 39,78 | 108,15 | 86,98 | 121,21 | 79,25 | 75,41 |

**Tabel 2,2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat**

| Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan | Anggaran pada Tahun ke- (.000) | | | | | Anggaran pada Tahun ke- (.000) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------|-------|-------|----------|--------------------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| BELANJA DAERAH | 213.664.356.664 | 125.753.004.612,04 | 246.490.011.486 | 153.386.559.097 | 313.799.980.265 | 113.801.185.580 | 109.827.931.248 | 226.539.105.076 | 104.186.267.460 | 248.477.832.739 | 0,53 | 0,87 | 0,92 | 0,68 | 0,79 | 10,09 | 21,56 |
| Belanja Tidak Langsung | 15.363.424.532 | 198.20.976.612 | 23.680.270.886 | 27.666.473.905 | 24.352.242.020 | 12.629.951.318 | 14.329.468.217 | 18.690.616.887 | 20.397.311.837 | 19.938.583.463 | 82,21 | 72,29 | 78,93 | 73,73 | 81,88 | 12,21 | 12,09 |
| Belanja Pegawai | 15.363.424.532 | 19.820.976.612 | 23.680.270.886 | 27.666.473.905 | 24.352.242.020 | 12.629.951.318 | 14.329.468.217 | 18.690.616.887 | 20.397.311.837 | 19.938.583.463 | 0,82 | 0,72 | 0,79 | 0,74 | 0,82 | 12,21 | 12,09 |
| Belanja Langsung | 198.300.932.132 | 105.932.028.000,04 | 222.809.740.600 | 125.720.085.192 | 289.447.738.245 | 101.171.234.262 | 95.498.463.031 | 207.848.488.189 | 83.788.955.623 | 228.539.249.276 | 51,02 | 90,15 | 93,29 | 66,65 | 73,82 | 9,92 | 22,60 |
| Belanja Pegawai | 446.9761.900 | 28.51.590.000 | 9.942.300.000 | 14.769.460.000 | 470.400.000 | 2.225.632.496 | 2.290.394.200 | 6.660.720.000 | 11.801.031.710 | 470.400.000 | 49,79 | 80,32 | 66,99 | 79,90 | 26482,57 | -43,04 | -32,20 |
| Belanja Barang dan Jasa | 73.315.974.734 | 51.715.597.110,04 | 58.393.069.460 | 61.720.406.250 | 189.215.615.301 | 36.142.832.766 | 43.691.975.676 | 48.500.595.889 | 29.528.471.883 | 132.523.883.217 | 49,30 | 84,49 | 83,06 | 47,84 | 13,04 | 26,75 | 38,38 |
| Belanja Modal | 120.515.195.498 | 51.364.840.890 | 154.474.371.140 | 49.230.218.942 | 99.761.722.944 | 62.802.722.944 | 49.516.093155 | 152.687.172.300 | 42.459.452.030 | 95.544.966.059 | 52,11 | 52,11 | 98,84 | 86,26 | 64,57 | -4,61 | 11,06 |

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisis berbagai aspek dalam pembangunan Kesehatan di Papua Barat, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi tantangan yang akan dihadapi dalam melaksanakan pembangunan Kesehatan di Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026. Tantangan-tantangan tersebut sebagai berikut :

1. Terbatasnya aksesibilitas, sarana dan prasarana terhadap pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan
2. Pemanfaatan, jumlah dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti posyandu, posbindu masih rendah dan belum berjalan secara teratur, sehingga peran serta masyarakat dalam kegiatan promotif dan preventif masih rendah
3. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular
4. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia Kesehatan belum merata
5. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Kesehatan Reproduksi yang belum maksimal
6. Upaya Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga belum terpenuhi di kabupaten/kota
7. Pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
8. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan
9. Banyaknya jenis Produk sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar yang memerlukan perhatian
10. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan, kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor

11. Belum semua kabupaten/kota memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi (masih manual)
12. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh

Adapun peluang yang mendukung pembangunan Kesehatan dalam tahun 2023-2026, antara lain :

1. Sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten di Wilayah Papua dalam rangka Otonomi Khusus meliputi: dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus (2,25% plafon DAU nasional), dan dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi khusus. Penerimaan khusus terdiri atas penerimaan yang bersifat umum (1%) dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan berbasis kinerja pelaksanaan (1,25%). Sedangkan, dana tambahan ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air minum, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.
2. Dukungan Kementerian Kesehatan melalui dan Dekonsentrasi dalam upaya peningkatan pelayanan Kesehatan.
3. Adanya beberapa dukungan Program dari Non Government Organization (NGO) dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam pengimplementasian program Kesehatan
4. Tingkat pendidikan yang semakin membaik dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman konsep sehat dan sakit masyarakat.
5. Antusias yang tinggi dari masyarakat akan informasi Kesehatan melalui media komunikasi cetak dan elektronik sehingga dapat dijadikan sebagai peluang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) masalah-masalah Kesehatan.

- 
6. Organisasi profesi senantiasa mendukung implementasi Program/kegiatan Kesehatan
 7. Di terbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi meliputi faktor internal dan faktor eksternal organisasi. Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi apabila tidak ditangani secara terprogram.

Pembangunan kesehatan di Papua Barat masih menghasilkan berbagai permasalahan dimana isu-isu strategis permasalahan tersebut adalah :

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No (1) | Masalah Pokok (2) | Masalah (3) | Akar Masalah (4) |
|-----------|--|---|---|
| 1 | Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan belum memadai | 1 Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah belum optimal | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah belum optimal 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah belum optimal 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah belum optimal |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | | | |
| | | | 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah belum optimal |
| | | | 5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | | | 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah belum optimal |
| | | | 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah belum optimal |
| | | | 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah belum optimal |
| | | | 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah belum optimal |
| | | 2 | Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan belum Secara Merata | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | | | 1. | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi belum merata |
| | | | 2. | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi belum merata |
| | | | 3. | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi belum optimal |

| | | | | | |
|--|--|----|---|---|--|
| | | | | | |
| | | 3 | Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan belum Secara Merata | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | | | | 1. | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi belum optimal |
| | | | | 2. | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia belum optimal |
| | | 4. | Belum optimalnya Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | |
| | | | | 1. | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) belum optimal |
| | | | | 2. | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) belum optimal |
| | | 5. | Masih endahnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | |
| | | | | 1. | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi belum optimal |
| | | | | 2. | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi belum optimal |

| | | | | |
|---|--------------------------|---|---|--|
| | | | | |
| 2 | Tingginya Angka Stunting | 1 | Pelayanan Kesehatan Gizi Balita belum optimal | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | | | | 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi belum optimal |

3.2 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kebijakan Kementerian Kesehatan berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di propinsi. Terkait dengan hal tersebut, maka kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan yang ada di Provinsi Papua Barat diharapkan berkesinambungan dengan kebijakan kesehatan ditingkat Pusat.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJMN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeadilan, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan Visi Presiden tersebut, Kementerian Kesehatan dalam Renstra 2020-2024 menjabarkan Visi Presiden di bidang kesehatan yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”.

Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 9 (Sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan system Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpecaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efkatif, dan Terpecaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Kementerian Kesehatan sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis
Kementerian Kesehatan**

| No | Tujuan Strategis | | Sasaran strategis | Indikator Sasaran Strategis |
|----|--|---|--|---|
| 1 | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup | 1 | Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase bumil KEK dari 17,3% menjadi 10% 2. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 95% 3. Jumlah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sebanyak 514 kabupaten/kota 4. Persentase balita stunting dari 27,7% menjadi 14% 5. Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif sebesar 60% |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | | | | <p>6. Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif dari 51% menjadi 100%</p> <p>7. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat sebesar 50%</p> <p>8. 100% kabupaten/kota menerapkan kebijakan KTR (Jumlah 514)</p> <p>9. kabupaten/kota sehat sebanyak 420 kabupaten/kota</p> |
| 2 | Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | 2 | Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan | <p>1. Seluruh kecamatan memiliki minimal 1 puskesmas</p> <p>2. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi rasio TT 1:1.000 sebesar 100%</p> <p>3. Persentase FKTP sesuai standar sebesar 100%</p> <p>4. Persentase RS terakreditasi sebesar 100%</p> <p>5. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasyankes lain</p> |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | | | |
| 3 | Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | 3 | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan Kesehatan masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya insidensi TB menjadi 190 per 100.000 penduduk pada tahun 2024 2. Menurunnya insidensi HIV menjadi 0,18% pada tahun 2024 3. Meningkatkan eliminasi malaria di 405 kabupaten/kota 4. Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap sebanyak 95 % 5. Meningkatnya kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM dan penyakit menular lainnya termasuk NTD sebanyak 514 kabupaten/kota 6. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86% |
| 4 | Peningkatan sumber daya | 4 | Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase puskesmas dengan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | kesehatan | | kefarmasian dan alat Kesehatan | ketersediaan obat esensial sebesar 96% |
| | | 5 | Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar sebesar 83% 2. Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib ada) sebesar 90% 3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 202.593 orang 4. Persentase puskesmas tanpa dokter sebesar 0% |
| | | 6 | Terjaminnya pembiayaan kesehatan | 1. Persentase anggaran kesehatan pemerintah pusat terhadap APBN sebesar 5,5% |
| 5 | Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif | 7 | Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM bidang kesehatan provinsi dan kabupaten/kota sebesar 100% 2. Persentase provinsi dengan anggaran |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | | | <p>kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan sebesar 100%</p> <p>3. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58</p> <p>4. Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan sebesar 95</p> <p>5. Persentase Satker KP/KD yang telah memenuhi Predikat WBK/WBBM (Kemenkes/Nasional)</p> |
| | | 8 | Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan | <p>1. Jumlah rekomendasi kebijakan hasil litbangkes yang dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan sebanyak 30 rekomendasi</p> <p>2. Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan sebanyak 100 SIK</p> |

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Dari tujuan penataan ruang kota di atas, seharusnya penataan ruang kota mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diperlukan agar didapatkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang komprehensif dan berpihak kepada masyarakat. Hal ini juga dalam rangka meminimalisir gejala ataupun dampak buruk yang bisa terjadi pada masyarakat. Gejala maupun dampak buruk kepada masyarakat akibat penataan ruang menjadi perhatian Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat:
 - a. Sinkronisasi antara program lintas PD belum optimal;
 - b. Koordinasi lintas PD/lintas instansi dalam pelaksanaan tugas belum optimal;
 - c. Potensi gejala dan dampak buruk terhadap masyarakat.
2. Faktor-faktor Pendorong :
 - a. Adanya peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Keterbukaan dan kelancaran informasi melalui sarana teknologi informasi.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, tidak dapat terlepas dari berbagai isu penting dan strategis yang berkembang, baik pada tatanan pemerintah Pusat maupun tatanan Daerah.

Isu-isu Strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan masih terbatas;
2. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan belum memadai serta penyebarannya belum merata;
3. Cakupan dan kualitas program program kesehatan belum optimal;
4. Tingginya prevalensi balita stunting.

Selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat memandang perlu untuk melakukan langkah - langkah responsif terhadap isu - isu tersebut, selain memperhatikan arah kebijakan pembangunan secara umum. Implementasi dari responsif tersebut selanjutnya dituangkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat periode 2023 – 2026.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah khususnya di bidang kesehatan periode tahun 2023-2026.

Tujuan yang dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Dengan memperhatikan masalah dan isu-isu strategis daerah, maka pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan juga selaras dengan amanat pembangunan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Papua Barat di bidang kesehatan dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam indikator beserta targetnya.

Oleh karena itu, sasaran dinyatakan dalam indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja dan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada periode tahun 2023-2026. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan di capai pada periode tahun 2023-2026.

4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

Tujuan jangka menengah dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat merupakan pernyataan tentang sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam periode 2023-2026. Tujuan dirumuskan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, yang menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Selain itu, tujuan tersebut juga dirumuskan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan Kesehatan yang ada di level Provinsi Papua Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat memiliki tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, tujuan tersebut yakni :

“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia unggul berkarakter dan kontekstual Papua Barat serta perlindungan sosial”

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

Sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Daerah Papua Barat “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia unggul berkarakter dan kontekstual Papua Barat serta perlindungan sosial” maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan periode tahun 2023-2026.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Koordinasi Kebijakan Daerah;
2. Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Menurunkan Angka Stunting.

Untuk mencapai tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, maka dirumuskan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas dan Akseibilitas Layanan Kesehatan yang merata;
3. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan secara merata;
4. Meningkatkan Akses Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
5. Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat;
6. Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin.

Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran dan Target Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

| No | Tujuan | | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran | | | |
|----|---|---|--|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Koordinasi Kebijakan Daerah | | | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | B Kategori | B Kategori | B Kategori | A Kategori |
| | | 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah | Nilai Lakip | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan | | | Angka Harapan Hidup | 66,04 Tahun | 66,31 Tahun | 66,57 Tahun | 66,84 Tahun |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | Meningkatkan kualitas dan akseibilitas layanan kesehatan yang merata | Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas | 75,50% | 83,11% | 91,32% | 100% |
| | | 2 | Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata | Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk | 10,50 per 1000 penduduk | 10,55 per 1000 penduduk | 11 per 1000 penduduk | 11 per 1000 penduduk |
| | | 3 | Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan | Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 4 | Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat | Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat | 46,15% | 61,54% | 79,92% | 100% |
| 3 | Menurunkan Angka Stunting | | | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita | 26% | 22% | 18% | 14% |
| | | | Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin | Persentase Balita Gizi Buruk | 8,5% | 7,5% | 7,2% | 6,9% |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel 5.1

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat**

| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | |
|--------|---|---------|---|----------|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Koordinasi Kebijakan Daerah | 1.1 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah | 1.1 | Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah | 1.1 | Peningkatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah |
| 2 | Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan | 2.1 | Meningkatkan Kualitas dan Akseibilitas Layanan Kesehatan Yang Merata dan Terjangkau Bagi Perempuan dan Laki-laki Khususnya Bagi OAP | 2.1 | Optimalisasi Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata dan Terjangkau Bagi Perempuan dan Laki-laki Khususnya Bagi OAP | 2.1.1 | Penguatan sistem rujukan dan penyediaan fasilitas kesehatan rujukan sesuai pemetaan kapasitas dan kondisi geografis |
| | | | | | | 2.1.2 | Percepatan Akreditasi dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| | | | | | | 2.1.3 | Perluasan Cakupan dan Pengembangan Layanan Telemedecine dan Pembangunan Puskesmas di Distrik Tanpa Puskesmas |
| | | | | | | 2.1.4 | Perluasan Peningkatan Kualitas Pelayanan Bergerak di Pelayanan Sulit Akses |
| | | | | | | 2.1.5 | Pengembangan Layanan Unggulan di RS Berdasarkan Kondisi Epidemologis dan Kebutuhan Masyarakat Setempat |
| | | | | | | 2.1.6 | Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan RS Rujukan dan Layanan Kesehatan Pada Penduduk Berdampak Bencana |
| | | | | | | 2.1.7 | Perluasan Layanan dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang Bersenegri Dengan Program Lain Yang Melengkapi Paket Manfaat JKN |
| | | 2.2 | Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kesehatan Baik Laki-laki maupun Perempuan Sesuai Standar Kualitas dan Standar Jumlah Secara Merata dengan Mengutamakan Tenaga Kesehatan OAP | 2.4 | Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Kualitas dan Standar Jumlah Secara Merata Dengan Mengutamakan Tenaga Kesehatan OAP | 2.4.1 | Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Melalui Afirmasi Pendayagunaan Lulusan Tenaga Kesehatan Terutama Untuk OAP Dalam Bentuk Ikatan Dinas, Penugasan Khusus dan Program Lainnya |
| | | | | | | 2.4.2 | Perluasan Cakupan Beasiswa Untuk Pendidikan Tenaga Kesehatan Bagi OAP Disertai Dengan Penempatan Wajib Pasca Kelulusan |
| | | | | | | 2.4.3 | Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan Melalui Pendidikan Dan Pelatihan |

| | | | | | |
|-----|---|-----|---|-------|--|
| | | | | 2.4.5 | Pengembangan Skema Insentif Dan Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Yang Berbasis Beban Kerja Dan Kondisi Geografis Lokasi Penugasan |
| 2.3 | Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Kesehatan Reproduksi | 2.2 | Optimalisasi Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Kesehatan Reproduksi | 2.2.1 | Peningkatan cakupan dan kualitas persalinan di fasilitas kesehatan serta pelayanan antenatal, neonatal dan pascapersalinan dengan tenaga kesehatan terlatih |
| | | | | 2.2.2 | Penguatan sistem rujukan meternal dan pemdampingan ibu hamil dan balita komplikasi |
| | | | | 2.2.3 | Peningkatan jumlah dan kapasitas puskesmas mampu PONEC dan RS Mampu PONEK |
| | | | | 2.2.4 | Perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap |
| | | | | 2.2.5 | Penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi |
| 2.4 | Meningkatkan Cakupan Pengendalian Penyakit Menular dan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular | 2.3 | Optimalisasi Cakupan Pengendalian Penyakit Menular dan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular | 2.3.1 | Intensifikasi Promosi Kesehatan Melalui Edukasi Masyarakat Dengan Prinsip Kontekstual Budaya Papua |
| | | | | 2.3.2 | Peningkatan Penemuan Kasus Melalui Deteksi Dini Dan Penemuan Kasus Penyakit Menular Secara Aktif Maupun Pasif |
| | | | | 2.3.3 | Peningkatan Penangan Kasus Meterapi Segera Dan Tepat Serta Pemantauan Pengobatan |
| | | | | 2.3.4 | Penguatan Sistim Surveilans Terpadu Berbasis Laboratorium |
| 2.5 | Meningkatnya Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan | 2.5 | Optimalisasi Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan | 2.5.1 | Perbaikan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Dan Vaksin Untuk Mencakupi Kebutuhan Seluruh Fasilitas Kesehatan |
| | | | | 2.5.2 | Peningkatan Kualitas Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Di Tingkat Provinsi |
| 2.6 | Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif | 2.6 | Optimalisasi Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif | 2.6.1 | Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Pembudayaan Masyarakat Hidup Sehat |
| | | | | 2.6.2 | Penguatan Regulasi Gerakan Masyarakat Untuk Membudayakan Hidup Sehat (Germas) Dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat Serta Keterjangkauan Pilihan Pangan Sehat |
| | | | | 2.6.3 | Peningkatan Kemandirian Dan Kapasitas Masyarakat Dalam Menyelenggarakan UKBM Terutama Posyandu Dan Posbindu PTM |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----|--|-----|---|-------|--|
| | | | | | | 2.6.4 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi |
| 3 | Menurunkan Angka Stunting | 3.1 | Mempercepat Pencegahan Stunting Melalui Intervensi Gizi yang Terkoordinir, Terpadu, dan Lintas Sektor Untuk Menyediakan Layanan Intervensi Gizi Spesifik Untuk Keluarga Sasaran Prioritas dan Intervensi Gizi Sensitif Untuk Semua Kelompok Masyarakat. Terutama Masyarakat Miskin | 3.1 | Percepatan Pencegahan Stunting Melalui Intervensi Gizi yang Terkoordinir, Terpadu, dan Lintas Sektor Untuk Menyediakan Layanan Intervensi Gizi Spesifik Untuk Keluarga Sasaran Prioritas dan Intervensi Gizi Sensitif Untuk Semua Kelompok Masyarakat. Terutama Masyarakat Miskin | 3.1.1 | Penguatan Surveilans Gizi Di Tingkat Kabupaten/Kota |
| | | | | | | 3.1.2 | Penguatan Sistem Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Gizi Bagi Keluarag Miskin |
| | | | | | | 3.1.3 | Penguatan Pendidikan Gizi Melalui Divertifikasi Pangan Lokal Untuk Memenuhi Kebutuhan Gizi Keluarga |
| | | | | | | 3.1.4 | Peningkatan Cakupan Dan Kualitas Pembinaan Keluarga Sejahtera Dalam Pengasuhan 1000 HPK |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan yang di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat periode 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, memiliki 9 (Sembilan) kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD.
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, memiliki 4 (Empat) kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - b) Pengembangan Rumah Sakit
 - c) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - d) Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)
 - e) Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
 - f) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - g) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
 - h) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
 - i) Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
 - j) Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - k) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

- l) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
 - c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
 - f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
 - g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - i) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
 - k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
 - m) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
 - n) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - o) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - p) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
 - q) Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
 - r) Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas

- s) Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
 - t) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - u) Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
 - v) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
 - w) Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
 - x) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
 - y) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS
 - z) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB
 - aa) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria
 - ä) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, dengan memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - b) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
 - c) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dimana memiliki (Tiga) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - b) Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - b) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - c) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua
- 3) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dimana memiliki 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK), memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
 - 2) Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dimana memiliki 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
- 2) Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - b) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dimana memiliki 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

6.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator kinerja dan target capaian kinerja yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---|----|----|------|------|--|---|------------|--------------------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | | | | x | xx | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 11 | Paket | 4,631,738,800 | 2 | Paket | 423,891,345 | 2 | Paket | 445,085,912 | 2 | Paket | 467,340,207 | 2 | Paket | 490,707,217 | 8 | Paket | 1,827,024,681 | Dinkes Papua Barat |
| | | | | | x | xx | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 | Paket | 1,145,927,010 | 1 | Paket | 194,378,958 | 1 | Paket | 204,097,905 | 1 | Paket | 214,302,800 | 1 | Paket | 225,017,940 | 4 | Paket | 837,797,603 | Dinkes Papua Barat |
| | | | | | x | xx | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 | Paket | 748,669,382 | 1 | Paket | 176,716,491 | 1 | Paket | 185,552,315 | 1 | Paket | 194,829,930 | 1 | Paket | 204,571,426 | 4 | Paket | 761,670,162 | Dinkes Papua Barat |
| | | | | | x | xx | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 16 | Dokumen | 386,235,000 | 5 | Dokumen | 171,000,000 | 5 | Dokumen | 179,550,000 | 5 | Dokumen | 188,527,500 | 5 | Dokumen | 197,953,875 | 20 | Dokumen | 737,031,375 | Dinkes Papua Barat |
| | | | | | x | xx | 01 | 1.06 | 0008 | Facilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 4 | Laporan | 1,276,706,385 | 1 | Laporan | 242,730,000 | 1 | Laporan | 254,866,500 | 1 | Laporan | 267,609,825 | 1 | Laporan | 280,990,316 | 4 | Laporan | 1,046,196,641 | Dinkes Papua Barat |
| | | | | | x | xx | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 | Laporan | 18,105,139,600 | 1 | Laporan | 4,799,688,953 | 1 | Laporan | 5,039,673,400 | 1 | Laporan | 5,291,657,070 | 1 | Laporan | 5,556,239,923 | 4 | Laporan | 20,687,259,346 | Dalam dan Luar Papua Barat |
| | | | | | x | xx | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 2,408,690,016 | 100 | % | 17,257,940,776 | 100 | % | 16,807,787,822 | 100 | % | 16,295,677,222 | 100 | % | 15,718,561,094 | 100 | % | 66,079,966,914 | |
| | | | | | x | xx | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 | Unit | 2,408,690,016 | 2 | Unit | 2,500,000,000 | 2 | Unit | 2,625,000,000 | 2 | Unit | 2,756,250,000 | 2 | Unit | 2,894,062,500 | 8 | Unit | 10,775,312,500 | Dinkes Papua Barat |
| | | | | | x | xx | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | Unit | - | 1 | Unit | 14,757,940,776 | 1 | Unit | 14,182,787,822 | 1 | Unit | 13,539,427,222 | Unit | Unit | 12,824,498,594 | 3 | Unit | 55,304,654,414 | Manokwari |
| | | | | | x | xx | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 7,656,618,875 | 100 | % | 2,217,796,785 | 100 | % | 2,328,686,624 | 100 | % | 2,445,120,955 | 100 | % | 2,567,377,001 | 100 | % | 9,558,981,365 | |
| | | | | | x | xx | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 | Laporan | 114,876,000 | 1 | Laporan | 64,350,000 | 1 | Laporan | 67,567,500 | 1 | Laporan | 70,945,875 | 1 | Laporan | 74,493,168 | 4 | Laporan | 277,356,543 | Dinkes Papua Barat |
| | | | | | x | xx | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 | Laporan | 5,014,385,775 | 1 | Laporan | 1,557,842,400 | 1 | Laporan | 1,635,734,520 | 1 | Laporan | 1,717,521,246 | 1 | Laporan | 1,803,397,308 | 4 | Laporan | 6,714,495,474 | Dinkes Papua Barat |
| | | | | | x | xx | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Disediakan | 4 | Laporan | 2,527,357,100 | 1 | Laporan | 595,604,385 | 1 | Laporan | 625,384,604 | 1 | Laporan | 656,653,834 | 1 | Laporan | 689,486,525 | 4 | Laporan | 2,567,129,348 | Dinkes Papua Barat |
| | | | | | x | xx | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 10,316,444,170 | 100 | % | 2,156,241,400 | 100 | % | 2,264,053,469 | 100 | % | 2,377,256,141 | 100 | % | 2,496,118,946 | 100 | % | 9,293,669,956 | |
| | | | | | x | xx | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajanya | 84 | Unit | 5,881,684,000 | 21 | Unit | 1,050,300,715 | 21 | Unit | 1,102,815,750 | 21 | Unit | 1,157,956,537 | 21 | Unit | 1,215,854,363 | 84 | Unit | 4,526,927,365 | Dinkes Papua Barat |
| | | | | | x | xx | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya | 23 | Unit | 1,610,461,095 | 6 | Unit | 420,120,285 | 6 | Unit | 441,126,299 | 6 | Unit | 463,182,613 | 6 | Unit | 486,341,743 | 24 | Unit | 1,810,770,940 | Dinkes Papua Barat |
| | | | | | x | xx | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 630 | Unit | 375,906,675 | 166 | Unit | 199,700,000 | 166 | Unit | 209,685,000 | 166 | Unit | 220,169,250 | 166 | Unit | 231,177,712 | 664 | Unit | 860,731,962 | Dinkes Papua Barat |
| | | | | | x | xx | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 | Unit | 2,448,392,400 | 1 | Unit | 486,120,400 | 1 | Unit | 510,426,420 | 1 | Unit | 535,947,741 | 1 | Unit | 562,745,128 | 4 | Unit | 2,095,239,689 | Dinkes Papua Barat |
| 2 | Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | Angka Harapan Hidup | | | | 66.54 | Tahun | | 66.67 | Tahun | | 66.80 | Tahun | | 66.94 | Tahun | | 66.94 | Tahun | | | |
| | 1.2 | Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata | 1.2 | Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Rasio Daya Tampung Rumah Saki Rujukan | 1.9 : 1000 | Rasio TT : 1000 Penduduk | 549,977,650,964 | 2.0 : 1000 | Rasio TT : 1000 Penduduk | 40,495,598,066 | 2.1 : 1000 | Rasio TT : 1000 Penduduk | 40,662,023,717 | 2.2 : 1000 | Rasio TT : 1000 Penduduk | 36,057,760,225 | 2.3 : 1000 | Rasio TT : 1000 Penduduk | 30,938,834,595 | 2.3 : 1000 | Rasio TT : 1000 Penduduk | 148,154,216,603 | |
| | | | | | | | | | | Persentase Rumah Sakit Rujukan Produksi Yang Terakreditasi | 100 | % | 34,953,321,305 | 100 | % | 11,508,370,015 | 100 | % | 12,083,788,514 | 100 | % | 12,712,602,938 | 100 | % | 13,348,233,082 | 100 | % | 49,652,994,549 | | |
| | | | | | | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | 100 | % | 21,167,850,175 | 100 | % | 1,992,910,600 | 100 | % | 2,092,556,130 | 100 | % | 2,197,183,936 | 100 | % | 2,307,043,132 | 100 | % | 8,589,693,798 | | |
| | | | | | | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi | 100 | % | 2,700,000,000 | 100 | % | 500,000,000 | 100 | % | 525,000,000 | 100 | % | 551,250,000 | 100 | % | 578,812,500 | 100 | % | 2,155,062,500 | | |

| | | | | 1 | 02 | 02 | 1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 | % | 554,839,498,454 | 100 | % | 41,183,489,687 | 100 | % | 41,384,309,921 | 100 | % | 36,840,785,740 | 100 | % | 31,761,011,387 | 100 | % | 151,169,596,735 | |
|--|--|--|--|---|----|----|------|------|---|---|-----|---------|-----------------|-----|---------|----------------|-----|---------|----------------|-----|---------|----------------|-----|---------|----------------|-----|---------|-----------------|--------------------|
| | | | | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | 1 | Unit | 16,000,000,000 | 1 | Unit | 2,804,845,423 | 1 | Unit | 3,354,912,305 | 1 | Unit | 3,522,657,920 | 1 | Unit | 3,698,790,816 | 4 | Unit | 13,381,206,464 | Papua Barat |
| | | | | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0026 | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempal Tikur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 1 | Unit | 514,594,303,667 | 1 | Unit | 28,055,168,264 | 1 | Unit | 27,189,747,816 | 1 | Unit | 21,911,870,531 | 1 | Unit | 16,085,650,419 | 1 | Unit | 93,242,437,030 | Papua Barat |
| | | | | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0026 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gagus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | Terlaksananya Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gagus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | 6 | Layanan | 3,219,223,070 | 3 | Layanan | 1,000,000,000 | 3 | Layanan | 1,050,000,000 | 3 | Layanan | 1,102,500,000 | 3 | Layanan | 1,157,625,000 | 12 | Layanan | 4,310,125,000 | Papua Barat |
| | | | | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintanance Center | Terlaksananya Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintanance Center | 0 | Unit | - | 1 | Unit | 1,500,000,000 | 1 | Unit | 1,575,000,000 | 1 | Unit | 1,653,750,000 | 1 | Unit | 1,736,437,500 | 4 | Unit | 6,465,187,500 | Manokwari |
| | | | | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya | 0 | Unit | - | 1 | Unit | 500,000,000 | 1 | Unit | 525,000,000 | 1 | Unit | 551,250,000 | 1 | Unit | 578,812,500 | 4 | Unit | 2,155,062,500 | Manokwari |
| | | | | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | 0 | Unit | - | 1 | Unit | 1,000,000,000 | 1 | Unit | 1,050,000,000 | 1 | Unit | 1,102,500,000 | 1 | Unit | 1,157,625,000 | 4 | Unit | 4,310,125,000 | Manokwari |
| | | | | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0013 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintanance Center yang Disediakan dan Dipelihara | 0 | Unit | - | 10 | Unit | 150,000,000 | 10 | Unit | 157,500,000 | 10 | Unit | 190,000,000 | 10 | Unit | 199,500,000 | 40 | Unit | 697,000,000 | Manokwari |
| | | | | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara Sesuai Standar | 10 | Unit | 190,000,000 | 10 | Unit | 190,000,000 | 10 | Unit | 199,500,000 | 10 | Unit | 209,475,000 | 10 | Unit | 219,948,750 | 40 | Unit | 818,923,750 | Dinkes Papua Barat |
| | | | | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0020 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | 0 | Unit | - | 2 | Unit | 500,000,000 | 2 | Unit | 525,000,000 | 2 | Unit | 551,250,000 | 2 | Unit | 578,812,500 | 8 | Unit | 2,155,062,500 | Papua Barat |
| | | | | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0025 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 4 | Dokumen | 6,887,852,104 | 1 | Dokumen | 2,170,662,000 | 1 | Dokumen | 2,279,195,100 | 1 | Dokumen | 2,393,154,854 | 1 | Dokumen | 2,512,812,596 | 4 | Dokumen | 9,355,824,550 | Papua Barat |
| | | | | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan | 8 | Paket | 13,948,119,613 | 2 | Paket | 3,312,814,000 | 2 | Paket | 3,478,454,700 | 2 | Paket | 3,652,377,435 | 2 | Paket | 3,834,996,306 | 8 | Paket | 14,278,642,441 | Dinkes Papua Barat |
| | | | | 1 | 02 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 | % | 131,427,503,531 | 100 | % | 35,288,118,048 | 100 | % | 37,451,378,205 | 100 | % | 39,762,686,797 | 100 | % | 42,233,434,784 | 100 | % | 154,735,617,834 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|--|---|----|----|------|------|---|--|-------|---------|---------------|------|---------|----------------|------|---------|----------------|------|---------|----------------|------|---------|----------------|-------|---------|----------------|------------------|
| | | | | | | 1 | 02 | 03 | 1.01 | | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi | Persentase Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi | 100 | % | 8,945,900,000 | 100 | % | 12,500,156,430 | 100 | % | 13,124,564,252 | 100 | % | 13,780,792,464 | 100 | % | 14,469,832,087 | 100 | % | 53,875,345,233 | |
| | | | | | | 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 0 | Orang | - | 50 | Orang | 2,500,156,430 | 50 | Orang | 2,624,564,252 | 50 | Orang | 2,755,792,464 | 50 | Orang | 2,893,582,087 | 200 | Orang | 10,774,095,233 | Papua Barat |
| | | | | | | 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0002 | Distribusi dan Penempatan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi | 159 | Orang | 8,945,900,000 | 50 | Orang | 10,000,000,000 | 50 | Orang | 10,500,000,000 | 50 | Orang | 11,025,000,000 | 50 | Orang | 11,576,250,000 | 200 | Orang | 43,101,250,000 | Papua Barat |
| | | | | | | 1 | 02 | 03 | 1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia | Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia | 100 | % | 5,557,500,189 | 100 | % | 20,551,843,570 | 100 | % | 21,579,435,748 | 100 | % | 22,659,207,536 | 100 | % | 23,792,167,913 | 100 | % | 88,582,654,767 | |
| | | | | | | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | 5 | Orang | 3,757,500,189 | 10 | Orang | 20,000,000,000 | 10 | Orang | 21,000,000,000 | 10 | Orang | 22,050,000,000 | 10 | Orang | 23,152,500,000 | 40 | Orang | 86,202,500,000 | Luar Papua Barat |
| | | | | | | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 4 | Dokumen | 1,800,000,000 | 1 | Dokumen | 551,843,570 | 1 | Dokumen | 579,435,748 | 1 | Dokumen | 609,207,536 | 1 | Dokumen | 639,667,913 | 4 | Dokumen | 2,380,154,767 | Papua Barat |
| | | | | | | 1 | 02 | 03 | 4.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Provinsi | Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua | 100 | % | 5,000,000,000 | 100 | % | 10,000,000,000 | 100 | % | 15,000,000,000 | 100 | % | 20,000,000,000 | 100 | % | 25,000,000,000 | 100 | % | 70,000,000,000 | |
| | | | | | | 1 | 02 | 03 | 4.02 | 0005 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua | 14 | Orang | 5,000,000,000 | 29 | Orang | 10,000,000,000 | 30 | Orang | 15,000,000,000 | 35 | Orang | 20,000,000,000 | 40 | Orang | 25,000,000,000 | 40 | Orang | 70,000,000,000 | Luar Papua Barat |
| | | | | | | 1 | 02 | 03 | 4.03 | | Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN | Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia | 100 | % | - | 100 | % | 2,500,000,000 | 100 | % | 2,700,000,000 | 100 | % | 2,900,000,000 | 100 | % | 3,000,000,000 | 100 | % | 11,100,000,000 | |
| | | | | | | 1 | 02 | 03 | 4.03 | 0001 | Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN | Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat | 0 | Orang | - | 5555 | Orang | 2,500,000,000 | 5555 | Orang | 2,700,000,000 | 5555 | Orang | 2,900,000,000 | 5555 | Orang | 3,000,000,000 | 22220 | Orang | 11,100,000,000 | Papua Barat |
| | 1.4 | Meningkatnya Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan | Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan | 1.4 | Persentase POKESMAS Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100% | 1 | 02 | 04 | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha | 100 | % | 222,309,143 | 100 | % | 445,072,571 | 100 | % | 466,726,200 | 100 | % | 489,712,510 | 100 | % | 514,948,137 | 100 | % | 1,916,459,418 | |
| | | | | | | | | | | | | Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang Memenuhi Ketentuan Perizinan | 100 | % | 444,618,286 | 100 | % | 222,309,143 | 100 | % | 233,424,600 | 100 | % | 245,095,830 | 100 | % | 257,350,621 | 100 | % | 958,180,194 | |
| | | | | | | 1 | 02 | 04 | 1.01 | | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | Persentase Terlaksananya Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | 100 | % | 444,618,286 | 100 | % | 445,072,571 | 100 | % | 466,726,200 | 100 | % | 489,712,510 | 100 | % | 514,948,137 | 100 | % | 1,916,459,418 | |
| | | | | | | 1 | 02 | 04 | 1.01 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Perizinan | 3 | Sarana | 444,618,286 | 3 | Sarana | 445,072,571 | 3 | Sarana | 466,726,200 | 3 | Sarana | 489,712,510 | 3 | Sarana | 514,948,137 | 12 | Sarana | 1,916,459,418 | Papua Barat |
| | | | | | | 1 | 02 | 04 | 1.02 | | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) | Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) | 100 | % | 444,618,286 | 100 | % | 222,309,143 | 100 | % | 233,424,600 | 100 | % | 245,095,830 | 100 | % | 257,350,621 | 100 | % | 958,180,194 | |
| | | | | | | 1 | 02 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | 1 | Sarana | 444,618,286 | 1 | Sarana | 222,309,143 | 1 | Sarana | 233,424,600 | 1 | Sarana | 245,095,830 | 1 | Sarana | 257,350,621 | 4 | Sarana | 958,180,194 | Papua Barat |
| | 1.5 | Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat | Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat | 1.5 | Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat | 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Posyandu Akrif (Posyandu Buka Layanan dan Melaporkan Kegiatan Posyandu) | 70.32 | % | 665,520,200 | 75 | % | 433,221,800 | 80 | % | 454,882,890 | 90 | % | 477,027,036 | 100 | % | 500,878,387 | 100 | % | 1,866,010,113 | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV Renstra. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI Renstra. Indikator kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat ditampilkan dalam tabel 7.1 dan Tabel 7.2 berikut

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

| No. | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Akhir Kinerja |
|-----|--|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Angka Harapan Hidup | 65,78 Tahun | 66,04 Tahun | 66,31 Tahun | 66,57 Tahun | 66,84 Tahun | 66,84 Tahun |
| 2 | Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas | 75,00% | 75,50% | 83,11% | 91,32% | 100% | 100% |
| 3 | Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk | 10,45 per 1000 penduduk | 10,50 per 1000 penduduk | 10,55 per 1000 penduduk | 11 per 1000 penduduk | 11 per 1000 penduduk | 11 per 1000 penduduk |
| 4 | Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100% | 78,33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat | 42,85% | 46,15% | 61,54% | 79,92% | 100% | 100% |
| 6 | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita | 30% | 26% | 22% | 18% | 14% | 14% |
| 7 | Persentase Balita Gizi Buruk | 10,05% | 8,5% | 7,5% | 7,2% | 6,9% | 6,9% |

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD

| No. | Indikator Program | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Akhir Kinerja |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan | Rasio TT : 1000 Penduduk | 1.9 : 1000 | 2.0 : 1000 | 2.1 : 1000 | 2.2 : 1000 | 2.3 : 1000 | 2.3 : 1000 |
| 2 | Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup | Angka Kematian Ibu | 101,48 | 85,61 | 70,28 | 59,98 | 45,41 | 45,41 |
| 6 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | Angka Kematian Bayi | 10,34 | 9,51 | 8,90 | 8,31 | 7,72 | 7,72 |
| 7 | Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi | Persen | 15,38 | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 |
| 8 | Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan | Persen | 23,08 | 25,00 | 45,00 | 65,00 | 85,00 | 85,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Kesehatan Lanjut Usia | | | | | | | |
| 9 | Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja | Persen | n.a | 55,00 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 85,00 |
| 10 | Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat | Kabupaten/Kota | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage) | Persen | 29 | 35 | 50 | 75 | 95 | 95 |
| 12 | Prevalensi HIV | Persen | 3,12 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 13 | Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk | Per 1000 Penduduk | 9,42 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 14 | Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) | Kabupaten/Kota | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| 15 | Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap | Persen | 63,7 | 65 | 80 | 95 | 100 | 100 |
| 16 | Capaian Universal Health Coverage (UHC) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar | Persen | 43,21 | 44,29 | 45,40 | 46,53 | 47,70 | 47,70 |
| 18 | Persentase Puskesmas Tersedia Obat Esensial | Persen | 51,35 | 55 | 70 | 85 | 100 | 100 |
| 19 | Persentase FKTP Terakreditasi | Persen | 42,94 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20 | Jumlah Kematian Jemaah Haji | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak yang dilaksanakan | Layanan | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 22 | Perentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional | Persen | 0 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 |
| 23 | Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | Persen | 14 | 20 | 35 | 55 | 75 | 75 |
| 26 | Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya | Orang | 14 | 29 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| 27 | Persentase Status Aktif Kepesertaan JKN-KIS | Persen | 85,98 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Presentase Posyandu Aktif (Posyandu Buka Layanan dan Melaporkan Kegiatan Posyandu) | Persen | 70,32 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 29 | Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kampanye Gerakan | Kabupaten/Kota | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | | | | | | | |
| 30 | Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang telah tersusun ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Meskipun demikian, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan RENSTRA ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan RENSTRA ini, agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara umum dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan dan subkegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian perubahan RESNTRA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah



**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT
2023**